



2023

LAKIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan / kegagalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam mencapai tujuan dan sasaran strateginya. Disamping itu, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini adalah tahun kedua dari pelaksanaan Renstra SKPD 2021 - 2026 dan sebagai pijakan/langkah untuk pelaksanaan kinerja yang akan datang. Segala keberhasilan pembangunan pada pelaksanaan Renstra yang lalu di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru tidak terlepas dari perhatian, bantuan dan kerja keras semua pihak mulai dari jajaran pemerintah, swasta dan masyarakat yang telah bersama-sama mendukung pelaksanaan program-program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru. Kami berharap bahwa segala program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya. Kami menyadari bahwa apa yang di sajikan masih jauh dari sempurna, namun kami berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Akhir kata diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mambantu dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini.

Banjarbaru, Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Banjarbaru

EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT

Pembina Tk. I

NIP. 19730727 199803 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1. Latar Belakang.....	12
1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi	13
1.3. Struktur Organisasi	15
1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi.....	16
1.5. Sistematika Penyajian.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama	18
2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja Eselon II	28
3.2. Capaian Kinerja Eselon III	Error! Bookmark not defined.
1. Sekretaris	Error! Bookmark not defined.
2. Kepala Bidang Sumber Daya Air	Error! Bookmark not defined.
3. Kepala Bidang Bina Marga	Error! Bookmark not defined.
4. Kepala Bidang Cipta Karya.....	Error! Bookmark not defined.
5 . Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi	Error! Bookmark not defined.
6 . Kepala Bidang Tata Ruang.....	Error! Bookmark not defined.
3.3. Capaian Kinerja Eselon IV (Sub. Koordinator)	Error! Bookmark not defined.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Error! Bookmark not defined.
2. Sub Bagian Perencanaan	Error! Bookmark not defined.
3. Sub. Bagian Keuangan	Error! Bookmark not defined.
4. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk..	Error! Bookmark not defined.
5. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa.....	Error! Bookmark not defined.
6. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.....	Error! Bookmark not defined.
7. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Error! Bookmark not defined.

8. Kepala Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
9. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	Error! Bookmark not defined.
10. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	Error! Bookmark not defined.
11. Kepala Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Error! Bookmark not defined.
12. Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Error! Bookmark not defined.
13. Kepala Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	72
4.1. Simpulan	72
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	73
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
1. SOP Pengumpulan data kinerja	Error! Bookmark not defined.
2. SK Pengelola SAKIP	Error! Bookmark not defined.
3. Foto Visual Kegiatan.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	23
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2023	29
Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2023	30
Tabel 3. 3 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	31
Tabel 3. 4 Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir Tahun 2023	32
Tabel 3. 5 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir	32
Tabel 3. 6 Perbandingan RPJMD dan Nasional Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir	33
Tabel 3. 7 Realisasi Keuangan Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir	34
Tabel 3. 8 Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi Tahun 2023	35
Tabel 3. 9 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	35
Tabel 3. 10 Perbandingan RPJMD dan Nasional Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	36
Tabel 3. 11 Realisasi Keuangan Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	37
Tabel 3. 12 Analisis Pencapaian Sasaran 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	38
Tabel 3. 13 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	39
Tabel 3. 14 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	40
Tabel 3. 15 Perbandingan RPJMD dan Nasional Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	40

Tabel 3. 16 Realisasi Keuangan Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	42
Tabel 3. 17 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.....	43
Tabel 3. 18 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	44
Tabel 3. 19 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	44
Tabel 3. 20 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	45
Tabel 3. 21 Realisasi Keuangan Sasaran 3 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.....	46
Tabel 3. 22 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatkan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	47
Tabel 3. 23 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Sasaran 4	48
Tabel 3. 24 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 4	48
Tabel 3. 25 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 4	48
Tabel 3. 26 Realisasi Keuangan Sasaran 4	50
Tabel 3. 27 Analisis Pencapaian Sasaran 5.....	51
Tabel 3. 28 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Sasaran 5	52
Tabel 3. 29 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 5	52
Tabel 3. 30 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 5	52
Tabel 3. 31 Realisasi Keuangan Sasaran 5	54
Tabel 3. 32 Analisis Pencapaian Sasaran 6	54
Tabel 3. 33 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Sasaran 6	55
Tabel 3. 34 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 6	56
Tabel 3. 35 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 6	56
Tabel 3. 36 Realisasi Keuangan Sasaran 6	58
Tabel 3. 37 Analisis Pencapaian Sasaran 7	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 38 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Sasaran 7	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 39 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 7	Error! Bookmark not defined.

Tabel 3. 40 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 7 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 41 Realisasi Keuangan Sasaran 7 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 42 Analisis Pencapaian Sasaran 8 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 43 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 8 58

Tabel 3. 44 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 8 59

Tabel 3. 45 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 8 59

Tabel 3. 46 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 8 61

Tabel 3. 47 Analisis Pencapaian Sasaran 9 61

Tabel 3. 48 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Sasaran 9 62

Tabel 3. 49 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 9 63

Tabel 3. 50 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 9 63

Tabel 3. 51 Realisasi Keuangan Sasaran 9 65

Tabel 3. 52 Analisis Pencapaian Sasaran 10 66

Tabel 3. 53 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Sasaran 10 67

Tabel 3. 54 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 10 67

Tabel 3. 55 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 10 68

Tabel 3. 56 Realisasi Keuangan Sasaran 10 70

Tabel 3. 57 Realisasi capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Eselon III . **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 58 Target dan Realisasi Eselon III Pada Sekretariat Dinas PUPR Kota Banjarbaru **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 59 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 60 Realisasi Keuangan Tahun 2023 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 61 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Sumber Daya Air .. **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 62 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.63 Realisasi Keuangan Bidang Sumber Daya Air **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.64 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Bina Marga **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 65 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.66 Realisasi Keuangan Bidang Bina Marga .. **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.67 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Cipta Karya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.68 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Kepala Bidang Cipta Karya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.69 Realisasi Keuangan Bidang Cipta Karya..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.70 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.71 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.72 Realisasi Keuangan Bidang Pengembangan Konstruksi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.73 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Bidang Tata Ruang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.74 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Kepala Bidang Tata Ruang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.75 Realisasi Keuangan Bidang Tata Ruang..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 76 Target dan Realisasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 77 Kegiatan Pendukung Sasaran Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum Kepegawaian di Sekretariat Dinas PUPR Kota Banjarbaru.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.78 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 79 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 80 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 81 Target dan Realisasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 82 Kegiatan Pendukung Sasaran Perjanjian Kinerja Sub Bagian perencanaan di Sekretariat Dinas PUPR Kota Banjarbaru	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.83 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Sub Bagian Perencanaan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 84 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 85 Realisasi Keuangan Tahun 2023.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 86 Target dan Realisasi	Error! Bookmark not defined.

Tabel 3. 87 Kegiatan Pendukung Sasaran Perjanjian Kinerja	Sub Bagian
Keuangan di Sekretariat Bappeda	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.88 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Sub Bagian Keuangan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 89Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 90 Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.91 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.92 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.93 Realisasi Keuangan Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.94 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.95 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.96 Realisasi Keuangan Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.97 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.98 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.99 Realisasi Keuangan Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau, dan Rawa.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.100 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.101 Realisasi dan Capaian 2 Tahun IV Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.102 Realisasi Keuangan Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.103 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.104 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Error! Bookmark not defined.

Tabel 3.105 Realisasi Keuangan Kinerja Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.106 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.107 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Kepala Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.108 Realisasi Keuangan Kinerja Kepala Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.109 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.110 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.111 Realisasi Keuangan Kinerja Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.112 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.113 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Kepala Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.114 Realisasi Keuangan Kinerja Kepala Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.115 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Seksi Peralatan dan Uji Mutu	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.116 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Kepala Seksi Peralatan dan Uji Mutu.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.117 Realisasi Keuangan Kinerja Kepala Seksi Peralatan dan Uji Mutu.	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.118 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.119 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.120 Realisasi Keuangan Kinerja Kepala Seksi Peralatan dan Uji Mutu.	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.121 Realisasi dan Capaian Indikator Kepala Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel 3.122 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Kepala Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.123 Realisasi Keuangan Kinerja Kepala Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan

dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

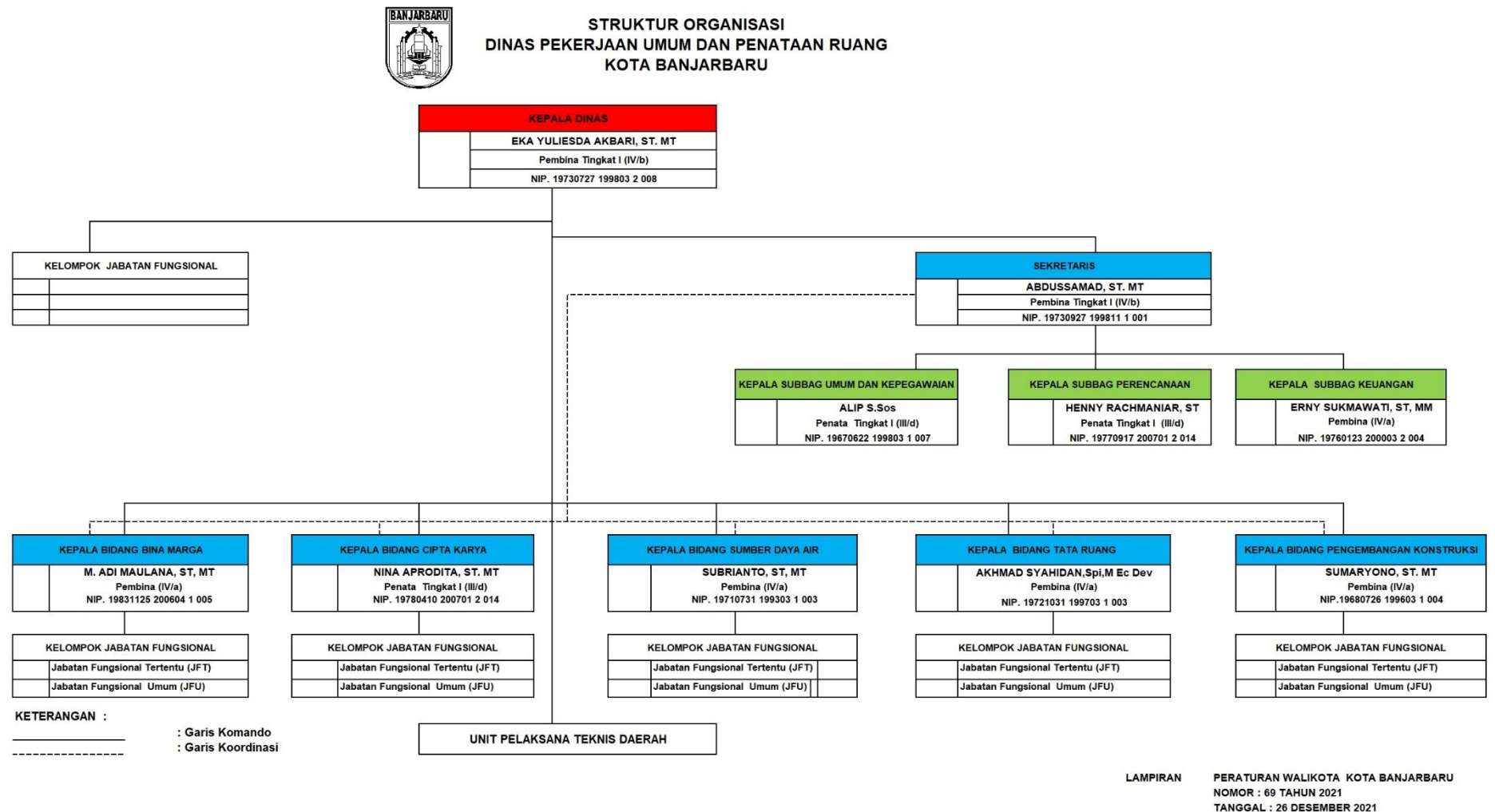
- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 Tanggal 26 Desember 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi :
 - 1. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa
 - 2. Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk
- d. Bidang Bina Marga terdiri dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- e. Bidang Cipta Karya terdiri dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi :
 - 1. Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman dan Pembangunan Gedung
 - 2. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan
- f. Bidang Tata Ruang terdiri dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang
 - 2. Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang
- g. Bidang Pengembangan Konstruksi terdiri dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi :
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
 - 2. Seksi Peralatan dan Uji Mutu

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut menyangkut peluang dan tantangan, serta kekuatan dan kelemahan yang secara langsung maupun tidak langsung akan membatasi atau mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis.

Memperhatikan permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD dan juga telah ditetapkannya Visi Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera 'JUARA' maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengangkat beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan Perangkat Daerah terhadap masyarakat.
2. Masih banyaknya infrastruktur perkotaan yang belum optimal.
3. Masih adanya daerah rawan banjir dan genangan yang belum terselesaikan
4. Masih banyaknya infrastruktur irigasi yang belum optimal
5. Masih adanya infrastruktur publik dan aparatur yang belum terbangun dan terpelihara

6. Belum terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten

1.5. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang , Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang dihadapi SKPD, dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perjanjian Kinerja , Indikator Kinerja Utama , Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja serta Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Meliputi kesimpulan umum atas capaian kinerja dan strategi peningkatan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut dirumuskan sasaran strategis.

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara review instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarbaru dengan Walikota Banjarbaru dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S. H., M. H.

Jabatan : Walikota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Oktober 2023

Pihak Kedua,

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S. H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS,

EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
NIP. 19730727 199803 2 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase peningkatan perlindungan banjir	44,17 %
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	74,61 %
2.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	98,85 %
3.	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	100 %
4.	Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	61,41 %
5.	Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Baik dan Merata	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	88,56 %

6.	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100 %
7.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan	Tingkat kemantapan jalan kota	83,51%
8.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%
9.	Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang Konsisten	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	78,00%

	Program	Anggaran
1.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 41.438.664.125,-
2.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 8.318.711.000,-
3.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 11.517.262.000,-
4.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 30.501.248.720,-
5.	Pengembangan Permukiman	Rp. 24.135.601.400,-
6.	Penataan Bangunan Gedung	Rp. 31.737.256.500,-
7.	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 46.217.986.955,-

- | | | | |
|----|--------------------------------|-----|-----------------|
| 8. | Pengembangan Jasa Konstruksi | Rp. | 3.584.798.000,- |
| 9. | Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp. | 2.938.657.000,- |

Banjarbaru, Oktober 2023

Pihak Kedua,

WALIKOTA BANJARBARU,


H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS


EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
NIP. 19730727 199803 2 008

2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; Lokasi Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok Sasaran; Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju tahun berikutnya. Berikut adalah beberapa rencana kerja tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru :

Tabel 2. 1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN PEMUTAKHIRAN		PAGU TAHUN 2023
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	
1.03.0.00.0.00.01.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	210.640.839.815
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.093.084.115
1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	307.478.600
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.958.400
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	183.520.200
1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.747.001.105
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.703.630.105
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.371.000
1.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.863.000
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.863.000
1.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000

1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	881.902.550
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.582.300
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193.974.850
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.189.900
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.400.000
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.165.000
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	49.590.500
1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1.100.365.000
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	486.306.000
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	85.260.000
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	207.055.000
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	321.744.000
1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	638.569.360
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.000.000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	383.569.360
1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	4.311.904.500
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.885.000
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	389.639.500
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3.442.430.000
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.750.000
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	400.000.000
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.200.000
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	41.438.664.125
1.03.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.695.649.125
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	19.508.959.200
1.03.02.2.01.34	Peningkatan Tanggul Sungai	10.708.861.825

1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	5.477.828.100
1.03.02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.743.015.000
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.361.906.000
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.383.577.000
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.997.532.000
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.318.711.000
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.318.711.000
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	8.318.711.000
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.517.262.000
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.517.262.000
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1.914.196.000
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	9.603.066.000
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	30.501.248.720
1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.501.148.720
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.276.368.000
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	2.853.802.300
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	4.964.831.900
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	4.556.536.000
1.03.06.2.01.15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	11.849.710.520
1.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	24.135.601.400

1.03.07.2.01.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	24.135.601.400
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	24.135.601.400
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	31.337.256.500
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	31.337.256.500
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	29.978.512.000
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.358.744.500
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	46.217.986.955
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	46.217.986.955
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	5.358.682.300
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	19.081.462.955
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	7.384.412.800
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	10.859.554.100
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.682.727.300
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	102.000.000
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	749.147.500
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	142.368.000
1.03.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	62.650.000
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	24.250.000
1.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	38.400.000
1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	79.718.000
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	79.718.000
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.938.657.000

1.03.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	2.372.783.000
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	80.750.000
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2.192.033.000
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	100.000.000
1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	295.684.000
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	295.684.000
1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	270.190.000
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	270.190.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja harus menjawab Perjanjian Kinerja, dan untuk tingkat provinsi harus membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Eselon II

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2022-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022-2026 sebanyak 10 (sepuluh) sasaran.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah sebanyak 9 (sembilan) sasaran strategis dengan sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	44,17	47,27	107,01
2	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,61	74,57	99,95
3	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap seluruh Rumah Tangga di Kota	%	98,85	99,12	100,28
4	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	%	100	100	100
5	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	62,13	62,36	100,37
6	Persentase Infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	88,56	88,56	100
7	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	81,33	84,33	103,69
9	Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	100
10	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	78,00	78	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	4
2	Sesuai Target	5
3	Tidak Mencapai Target	1

Sasaran 1 : “Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air”

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 3 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	44,17	47,27	107,01	70,07
2	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,61	74,57	99,95	90,40
Rata-rata Capaian Kinerja					103,48	

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu :

1. Persentase peningkatan perlindungan banjir
2. Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Sasaran 1 Indikator 1 : “Persentase peningkatan perlindungan banjir”

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air menggambarkan salah satu aksi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyelenggarakan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air termasuk didalamnya mengurangi kawasan rawan banjir yang setiap tahunnya terjadi dengan pemeliharaan sungai, embung/kolam retensi dan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur perlindungan banjir seperti tanggul, perkuatan tebing sungai dan embung. Banjir di beberapa tahun sebelumnya, yang mana penanganan banjir melainkan harus menyeluruh dengan memperhatikan kondisi dari hulu ke hilir.

Indikator kinerja adalah persentase Peningkatan Perlindungan Banjir. Indikator ini menunjukan kawasan rawan banjir yang lingkungannya akan diperbaiki dengan

infrastruktur pengendali banjir, diharapkan dengan infrastruktur yang dipelihara dan dibangun tersebut banjir dapat diminimalisasi atau bahkan tidak terjadi lagi.

Pengukuran indikator persentase peningkatan perlindungan banjir dihitung berdasarkan panjang sungai yang ditangani dengan infrastruktur pengendali banjir pada tahun ke-n dibagi dengan total panjang sungai yang akan ditangani sampai akhir 2026, kemudian dikali 100.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator ***Persentase peningkatan perlindungan banjir*** adalah :

Tabel 3. 4 Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%	44,17	47,27	107,01

Indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 44,17 %, dengan realisasi sebesar 47,27%. Capaian kinerja sebesar 107,01 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3. 5 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	24,65 / 101,27	39,11/ 110,98	47,27/107,01

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun yaitu tahun 2021 sebesar 24,65%, tahun 2022 sebesar 39,11% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 47,27%.

- b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3. 6 Perbandingan RPJMD dan Nasional Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase peningkatan perlindungan banjir	47,27	70,07	-

Realisasi Persentase peningkatan perlindungan banjir tahun 2023 sebesar 47,27 % belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 70,07% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir tidak ada hambatan yang berarti dikarenakan pekerjaan berlangsung di saat musim kemarau, sehingga pekerjaan peningkatan sungai baik normalisasi ataupun perkuatan tebing sungai bisa diselesaikan tepat waktu walaupun ada 1 paket pekerjaan Pembangunan embung yang mengalami keterlambatan namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi realisasi target serta capaian.

4. Upaya yang telah dilakukan

- Melakukan perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi target yang akan dicapai.
- Mensosialisasikan kepada masyarakat PP No 38 tahun 2011 tentang sungai dan Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau agar masyarakat tidak mendirikan bangunan permanen di atas sempadan sungai.
- Melakukan Kajian Sempadan Sungai sebagai dasar rencana pembuatan PERDA tentang sempadan sungai.
- Mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Sungai Kota Banjarbaru untuk pekerjaan pembangunan atau peningkatan atau pelebaran Sungai diutamakan sistem hibah lahan dari masyarakat, bukan membeli lahan.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efisiensi atas penggunaannya sebesar 21,66%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase peningkatan perlindungan banjir ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya
- Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai
- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator **Persentase peningkatan perlindungan banjir** tahun 2023 sebesar Rp. 35.695.649.125,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 27.964.749.761,- atau 78,34 % dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Realisasi Keuangan Indikator Persentase Peningkatan Perlindungan Banjir

No.	Kegiatan	Pagu	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 35.695.649.125	Rp 27.964.749.761	78,34
Jumlah		Rp 35.695.649.125	Rp 27.964.749.761	78,34

Sasaran 1 Indikator 2 : “Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi”

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air menggambarkan tindakan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyelenggarakan konservasi dan

pendayagunaan sumber daya air serta untuk menunjang produksi di sektor pertanian. Berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 293/KPTS/M/2014, Tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Banjarbaru terdiri dari 11 (sebelas) Daerah Irigasi Permukaan.

Indikator kinerja adalah ***persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi***. Indikator ini menunjukkan luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi, diharapkan dengan infrastruktur yang dibangun tersebut dapat meningkatkan produksi di sektor pertanian.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi adalah :

Tabel 3. 8 Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,61	74,57	99,95

Indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 74,61%, telah terealisasi sebesar 74,57% sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,95%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3. 9 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,05 / 99,94	69,35 / 100	74,57 / 99,95

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun yaitu tahun 2021 sebesar 64,05%, tahun 2022 sebesar 69,35% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai yaitu sebesar 74,57%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3. 10 Perbandingan RPJMD dan Nasional Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	74,61	90,40	-

Realisasi Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2023 sebesar 74,57% dan target akhir pada RPJMD tahun 2026 adalah 90,40% sedangkan target Nasional tidak ada.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi pada akhir tahun anggaran capaian kinerja hanya sebesar 99,95% belum memenuhi target. Hal ini dikarenakan pada saat penentuan target pekerjaan masih menggunakan harga satuan lama, sedangkan pada saat pelaksanaan pekerjaan terjadi kenaikan harga. Untuk menyesuaikan perubahan harga yang terjadi, dilaksanakan addendum pekerjaan sehingga mengurangi panjang saluran.

4. Upaya yang telah dilakukan

- Melakukan perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi target yang akan dicapai.
- Mensosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat setempat dan yang terkena dampak langsung terhadap kegiatan.

- c. Melakukan pengawasan dari pihak pengawas lapangan didampingi konsultan pengawas secara berkala kepada pihak pelaksana berkaitan dengan proses pekerjaan.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efisiensi atas penggunaannya sebesar 11,88% dari keseluruhan anggaran yang disiapkan. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :

Terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran kegiatan yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator ***Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi*** tahun 2023 sebesar Rp. 5.743.015.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 5.060.994.000,- atau 88,12 % dengan rincian anggaran per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Realisasi Keuangan Indikator Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi

No.	Kegiatan	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha	Rp 5.743.015.000	Rp 5.060.994.000	88,12

	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Jumlah		Rp 5.743.015.000	Rp 5.060.994.000	88,12

Sasaran 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 12 Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	98,85	99,12	100,28	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100,28	

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota.

Sasaran 2 Indikator 1 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota

SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) adalah suatu sistem yang di dalamnya mencakup proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku (kualitas & kuantitas), transmisi air baku dari intake (sumber air baku) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA), teknologi Instalasi Pengolahan Air/ IPA yang efektif dari segi

performance dan biaya, transmisi air olahan (air minum) dari lokasi IPA ke *reservoir (offtake)*, sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan. Hal-hal teknis maupun administrasi yang terkait dengan proses penyediaan air minum dimasukkan dalam sistem pengelolaan SPAM.

Indikator kinerja adalah Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota. Indikator ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan akses air minum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota adalah :

**Tabel 3. 13 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Sasaran 2
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	%	98,85	99,12	100,28

Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 98,85 % dan telah terealisasi sebesar 99,12% sehingga Capaian kinerjanya adalah sebesar 100,28%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3. 14 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 2 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	97,15 / 100,62	98,42 / 100,74	99,12 / 100,28

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 sebesar 97,15%, tahun 2022 sebesar 98,42% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 99,12%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3. 15 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 2 Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	99,12	100	100

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota tahun 2023 sebesar 99,12% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan belum mencapai target nasional dengan capaian 100%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota pada akhir tahun anggaran capaian kinerja

sebesar 100,28% dari target awal tahun sebesar 98,85% dan akhir tahun realisasi sebesar 99,12%, target yang dicapai lebih dari rencana dikarenakan adanya revisi terhadap kondisi existing serta adanya penambahan anggaran pada APBD Perubahan. Adanya penambahan pagu anggaran mempengaruhi realisasi Panjang jaringan perpipaan yang terpasang yang akhirnya menentukan penambahan jumlah KK yang terlayani sistem air minum dibagi jumlah total KK se Kota Banjarbaru sehingga persentase KK yang mendapatkan akses air minum yang aman berupa pipa sambungan rumah yang dipasang oleh PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebagai Perusahaan satu-satunya penyelenggara SPAM Kerjasama antara Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Hal lain juga disebabkan masyarakat Kota Banjarbaru mulai bersedia untuk berlangganan jaringan PDAM, dimana jaringan PDAM adalah merupakan salah satu akses aman terhadap air minum.

4. Upaya yang telah dilakukan

Dalam rangka meningkatkan prosentase air minum yang aman menuju 100% pada tahun 2024 nanti, Bidang Cipta Karya berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum aman melalui pembangunan jaringan distribusi sekunder dan tersier perpipaan air minum diameter 2-8 inch yang tersebar di seluruh Kota Banjarbaru. Selain itu, untuk meng-cover Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak mampu membayar biaya berlangganan PTAM Intan Banjar, telah direncanakan jaringan perpipaan non PTAM yang rencananya fisik konstruksinya akan dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum pada tahun 2023.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efisiensi atas penggunaannya sebesar 5,30%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan besarnya pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator ***Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota*** tahun 2023 sebesar Rp 8.318.711.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 7.878.181.708,- atau 94,70% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Realisasi Keuangan Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 8.318.711.000	Rp 7.878.181.708	94,70
Jumlah		Rp 8.318.711.000	Rp. 7.878.181.708	94,70

Sasaran 3 : “Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah”

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 17 Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	%	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100	

Sasaran kinerja Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota

Sasaran 3 Indikator 1 : “Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota”

Secara umum limbah domestik yang berasal dari rumah tangga dan yang tidak memiliki akses terhadap bangunan pengolahan merupakan sumber pencemaran utama bagi lingkungan yang dapat menimbulkan dampak yang serius karena dapat dengan mudah masuk ke dalam air atau pun meresap ke dalam tanah. Fakta dilapangan menunjukkan, air limbah domestik ini merupakan sumber utama pencemaran pada air lingkungan terutama di daerah perkotaan.

Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik/MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota adalah :

**Tabel 3. 18 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 3
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	%	100	100	100

Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 100% dan telah terealisasi yaitu 100%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

**Tabel 3. 19 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 3
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di Kota	100 /100	100/100	100/100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%, dimana didalam 100% ini terbagi menjadi 2 (Dua) yaitu akses Layak dan akses Aman, seperti Data Capaian SPM Tahun 2023.

- b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3. 20 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 3
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	100	100	100

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota tahun 2023 sebesar 100%, realisasi ini mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan mencapai target nasional dengan capaian 100%.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik kota pada akhir tahun anggaran capaian kinerja 100% dimana di dalam capaian 100% terbagi menjadi akses layak dan akses aman berdasarkan data capaian SPM Tahun 2023.

4. Upaya yang telah dilakukan

- Untuk mencapai akses sanitasi aman bagi masyarakat Kota Banjarbaru, Bidang Cipta Karya berupaya membangun infrastruktur sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, sejak 2022 Bidang Cipta Karya juga berupaya untuk ikut berkolaborasi dalam mengintervensi pencegahan stunting bagi balita. Hal ini dilakukan melalui pembangunan tangki septik individual yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sanitasi dan Pembangunan WC melalui APBD Kota Banjarbaru. Kegiatan ini rencananya akan tetap dilaksanakan di tahun-tahun mendatang sampai seluruh rumah Kepala Keluarga (KK) yang memiliki balita yang tersuspek akan mengalami stunting telah memiliki akses sanitasi dan air minum yang aman.
- Pada Tahun Anggaran 2023, Bidang Cipta Karya juga memasang Home Biogas Toilet Instalation sebanyak 1 Unit di Lingkungan Kantor Dinas PUPR Kota Banjarbaru. Home Biogas Toilet salah satu alternatif yang bisa mengubah limbah tubuh yang polutan menjadi sumber daya yang berharga

dengan menggunakan sistem anaerobik alat ini menguraikan sampah dan mengubahnya menjadi biogas. Alat ini masih dalam tahap uji coba dalam penggunaannya. Alat ini mudah dipasang, aman, tidak merepotkan, tidak menimbulkan polusi, ramah lingkungan.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efisiensi atas penggunaannya sebesar 6,09%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik kota ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
- b. Sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik kota tahun 2023 sebesar Rp 11.517.262.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 10.815.816.540,- atau 93,91% dengan rincian per program sebagai berikut :

**Tabel 3. 21 Realisasi Keuangan Sasaran 3
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 11.517.262.000	Rp 10.815.816.540	93,91
Jumlah		Rp 11.517.262.000	Rp 10.815.816.540	93,91

Sasaran 4 : “Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas”

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 22 Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Target RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	62,13	62,36	100,37	67,94
	Rata-rata Capaian Kinerja				100,37	

Sasaran kinerja Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase saluran drainase yang berfungsi baik

Sasaran 4 Indikator 1 : “Persentase saluran drainase yang berfungsi baik”

Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase menggambarkan kondisi saluran drainase jalan kota dan drainase jalan lingkungan yang telah dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2023 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Persentase saluran drainase yang berfungsi baik diukur berdasarkan hasil dari panjang drainase jalan kota dan drainase jalan lingkungan yang berfungsi baik dibagi total target panjang drainase.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik adalah :

Tabel 3. 23 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Sasaran 4
Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%	62,13	62,36	100,37	

Indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 62,13 %, telah terealisasi yaitu 62,36%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100,37%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3. 24 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 4
Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	58,56 / 101,20	60,45 / 101	62,36/100,37

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 sebesar 58,56%, tahun 2022 sebesar 60,45% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 62,36%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3. 25 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 4
Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	62,36	67,94	-

Realisasi Persentase saluran drainase yang berfungsi baik tahun 2023 sebesar 62,36% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 67,94% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan untuk capaian kinerja dengan target indikator Persentase Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik, yang merupakan gabungan antara 2 indikator target yaitu “Persentase Saluran Drainase Jalan Kota yang Berfungsi Baik dan Persentase Saluran Drainase Jalan Lingkungan yang Berfungsi Baik”, yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan dan dilaksanakan oleh 2 Bidang (Bina Marga dan Cipta Karya), dikarenakan adanya perhatian dari Pemerintah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik dengan memberikan tambahan pagu anggaran melalui APBD Perubahan 2023 sehingga semua permasalahan drainase bisa teratasi.

4. Upaya yang telah dilakukan

- a. Melakukan updating atau menginventarisasi saluran-saluran drainase yang kondisinya rusak ringan atau berat dengan melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan melalui sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- b. Mengharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeliharaan saluran drainase dilingkungan mereka dengan melakukan pembersihan dari tanah endapan dan sampah-sampah agar aliran airnya bisa lancar sehingga saluran drainase bisa berfungsi baik.
- c. Membuat sumur-sumur resapan di beberapa titik yang ditengarai memiliki andil dalam menciptakan volume debit air hujan yang relatif cukup besar. Air yang masuk ke dalam sumur resapan diharapkan dapat mengurangi genangan yang terjadi di sekitar daerah tersebut dan dapat menjadi cadangan air tanah bagi lingkungan sekitar.
- d. Selain itu, Bidang Cipta Karya sebagai pelaksana kewenangan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan drainase lingkungan di perumahan, berupaya mengkoneksikan baik drainase yang sudah terbangun maupun yang akan terbangun, dengan drainase sekunder ataupun drainase primer dengan tetap mengacu kepada pembangunan drainase yang berwawasan lingkungan (eco-drainage), yaitu drainase yang dilengkapi dengan sumur resapan ataupun kolam detensi/retensi mini.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efisiensi atas penggunaannya sebesar 7,08%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - I. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 - c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
 - d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase saluran drainase yang berfungsi baik tahun 2023 sebesar Rp. 30.501.248.720,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 28.340.620.700,- atau 92,92% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3. 26 Realisasi Keuangan Sasaran 4
Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 30.501.248.720	Rp 28.340.620.700	92,92
Jumlah		Rp. 30.501.248.720	Rp. 28.340.620.700	92,92

Sasaran 5 : “Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Baik dan Merata”

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 27 Analisis Pencapaian Sasaran 5
Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Baik dan Merata

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	88,56	91,76	103,61	93,06
Rata-rata Capaian Kinerja					103,61	

Sasaran kinerja Meningkatnya Pengembangan Permukiman dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik

Sasaran 5 Indikator 1 : “Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik”

Meningkatnya kemantapan jalan lingkungan menggambarkan kondisi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang telah terbangun dan yang telah dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2023 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Meningkatnya kemantapan jalan lingkungan diukur berdasarkan hasil dari panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dan sedang (sampai dengan tahun 2023) dibagi total panjang jalan dengan status ruas jalan lingkungan dikali 100%.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya pengembangan permukiman dengan indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik adalah :

**Tabel 3. 28 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Sasaran 5
Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Baik dan Merata**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%	88,56	91,76	103,61

Indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 88,56 %, telah terealisasi sebesar 91,76% sehingga Capaian kinerjanya ini sebesar 103,61%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

**Tabel 3. 29 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 5
Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Baik dan Merata**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	85,56 / 100	87,06 / 100	91,76 / 103,61

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun yaitu tahun 2021 sebesar 85,56%, tahun 2022 sebesar 87,06% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 91,76%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

**Tabel 3. 30 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 5
Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Baik dan Merata**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	91,76	93,06	-

Realisasi Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar 91,76% belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 93,06% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan untuk capaian kinerja dengan target Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dikarenakan adanya perbaikan jalan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan.

4. Upaya yang telah dilakukan

- a. Bidang Cipta Karya dalam meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis, berupaya melalui peningkatan jalan lingkungan di kompleks perumahan. Sebagaimana arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK, peningkatan jalan lingkungan dilaksanakan pada aset-aset fasilitas PSU perumahan yang keberadaan asetnya telah melalui proses serah terima aset dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Banjarbaru. Bidang Cipta Karya berupaya agar seluruh jalan lingkungan yang telah dilaksanakan peningkatannya, dimasukkan dalam database rencana inventarisasi jalan lingkungan yang kemudian akan diperbarui melalui Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efisiensi atas penggunaannya sebesar 6,63%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengembangan Permukiman

- I. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar Rp 24.135.601.400,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 22.534.671.360,- atau 93,37% dengan rincian per program sebagai berikut :

**Tabel 3. 31 Realisasi Keuangan Sasaran 5
Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Baik dan Merata**

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengembangan Permukiman	Rp 24.135.601.400	Rp 22.534.671.360	93,37
Jumlah		Rp 24.135.601.400	Rp 22.534.671.360	93,37

Sasaran 6 : “Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik”

Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 32 Analisis Pencapai Sasaran 6
Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase Gedung Negara Milik Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100	

Sasaran kinerja Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu:

1. Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik

Sasaran 6 Indikator 1 : “Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik”

Meningkatnya Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik melalui kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Banjarbaru dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjarbaru dan mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota bertujuan agar dapat menambah fasilitas perkantoran dan fasilitas umum di Kota Banjarbaru yang lebih baik dan sesuai dengan Standar.

Indikator Persentase Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik dihitung berdasarkan hasil dari jumlah paket yang direncanakan pada kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota dibagi jumlah paket yang terlaksana dikali 100%.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya penataan bangunan gedung dengan indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik adalah :

**Tabel 3. 33 Realisasi dan Capaian Tahun 2022 Sasaran 6
Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100

Indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 100%,telah terealisasi yaitu 100%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

- a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3. 34 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 6
Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100 / 100	100 / 100	100 / 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun yaitu pada tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100% dan pada tahun 2023 sebesar 100%.

- b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3. 35 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 6
Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100	100	-

Realisasi Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar 100%, realisasi ini mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Keberhasilan untuk capaian kinerja dengan target indikator Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik dikarenakan pada Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota semua pekerjaan pembangunan Gedung baik yang menjadi aset maupun masuk dalam belanja Hibah dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

4. Upaya yang telah dilakukan

- a. Dalam upaya mencapai Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi, Bidang Cipta Karya berupaya membangun dan merencanakan pembangunan kantor-kantor pemerintah Pemerintah Kota Banjarbaru yang sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta aturan turunannya. Sejak kuartal kedua 2022, Bidang Cipta Karya tidak lagi melaksanakan rehabilitasi atau pemeliharaan kantor-kantor di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini merupakan hasil dari saran tindak/temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap hal ini. Menurut BPK, kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan kantor merupakan tanggung jawab dari SKPD masing-masing, karena terkait dengan aset kepemilikan dari gedung tersebut yang tidak dapat dicatatkan pada Dinas PUPR terhadap belanja modal yang telah dilaksanakan oleh Dinas PUPR dari kegiatan tersebut.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efisiensi atas penggunaannya sebesar 11,93%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penataan Bangunan Gedung

- I. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator **Persentase gedung Negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik** tahun 2023 sebesar Rp 31.337.256.500,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 25.597.646.680,00 atau 88,07% dengan rincian per program sebagai berikut :

Tabel 3. 36 Realisasi Keuangan
Sasaran 6 Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik

No.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 31.337.256.500,-	Rp 25.597.646.680,-	88,07
Jumlah		Rp 31.337.256.500,-	Rp 25.597.646.680,-	88,07

Sasaran 7 Indikator 1 : “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan”

Meningkatnya kemantapan jalan kota menggambarkan kondisi jalan dan jembatan yang telah terbangun dan yang telah dipelihara oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2023 sebagai implementasi dari perencanaan yang telah tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Meningkatnya kemantapan jalan kota diukur berdasarkan hasil dari panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (sampai dengan tahun 2023) dibagi total panjang jalan dengan status ruas jalan kota dikali 100.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja meningkatnya penyelenggaraan jalan dengan indikator tingkat kemantapan jalan kota adalah :

Tabel 3. 37 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Sasaran 7
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Kemantapan Jalan kota	%	81,33	84,33	103,69

Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kota berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 81,33 %, telah terealisasi yaitu 84,33%. Capaian kinerjanya sebesar 103,69%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

Tabel 3. 38 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 7 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Tingkat Kemantapan Jalan kota	81,27 / 100,07	82,66 / 101,64	84,33 / 103,69

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 sebesar 81,27%, tahun 2022 sebesar 82,66% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 84,33%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

Tabel 3. 39 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 7 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Tingkat Kemantapan Jalan kota	84,33	81,87	-

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan kota tahun 2023 sebesar 84,33% realisasi ini melebihi target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 81,87% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Program Penyelenggaraan Jalan memiliki indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kota. Realisasi untuk indikator tersebut diukur dari capaian output 6 (enam) sub kegiatan yaitu Pembangunan Jalan, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Rehabilitasi Jembatan. Keberhasilan capaian kinerja dari program ini dikarenakan adanya perhatian dari Pemerintah Kota Banjarbaru untuk meningkatkan kemantapan jalan

kota dengan memberikan tambahan pagu anggaran melalui APBD Perubahan 2023 untuk sub kegiatan Pembangunan Jalan terdapat realisasi/output yang menunjang pencapaian target tingkat kemantapan jalan kota (1.176 m), sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan terdapat realisasi/output yang menunjang pencapaian target tingkat kemantapan jalan kota (8.815 m), sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan terdapat realisasi/output (4.511 m), sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan terdapat realisasi/output (4.023 m) dan sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.

4. Upaya yang telah dilakukan

- a. Melakukan perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien dengan tidak mengurangi target yang akan dicapai.
- b. Mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru terhadap masyarakat secara umum dan khususnya terhadap masyarakat yang terkena dampak terkait pekerjaan Bidang Bina Marga Kota Banjarbaru untuk pekerjaan pembangunan atau peningkatan atau pelebaran jalan diutamakan sistem hibah lahan dari masyarakat, bukan membeli lahan untuk pembebasan jalan.
- c. Melakukan pemantauan secara berkala kepada pihak penyedia/supplier material berkaitan dengan proses pengolahan dan material yang diperlukan.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efisiensi atas penggunaannya sebesar 9,19%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan kota ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
 - I. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - b. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
 - c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
 - f. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
 - g. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator **Tingkat Kemantapan Jalan Kota** tahun 2023 sebesar Rp. 46.217.986.955,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 41.972.319.843,00 atau 90,81 % dengan rincian per program sebagai berikut :

**Tabel 3. 40 Perbandingan RPJMD dan Nasional
Sasaran 7 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan**

No.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 46.217.986.955	Rp. 41.972.319.843	90,81
Jumlah		Rp. 46.217.986.955	Rp. 41.972.319.843	90,81

Sasaran 8 : “Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi”

Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 41 Analisis Pencapaian Sasaran 8
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100	

Sasaran kinerja Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

Sasaran 8 Indikator 1 : “Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi”

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi menggambarkan penilaian kinerja yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan layanan jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru. Meningkatnya pengawasan usaha jasa konstruksi diukur berdasarkan persentase layanan informasi jasa konstruksi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi dengan indikator Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi adalah :

**Tabel 3. 42 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Sasaran 9
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	100	100	100

Indikator Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 100%, telah terealisasi yaitu 100%. Capaian kinerjanya ini sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

**Tabel 3. 43 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 8
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi**

No	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 / 100	100 / 100	100 / 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun terakhir adalah 100%. Realisasi kinerja indikator Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksitahun ini yaitu 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

**Tabel 3. 44 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 8
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100	100	-

Realisasi Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tahun tahun 2023 sebesar 100%, realisasi ini mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Program Pengembangan Jasa Konstruksi memiliki indikator Persentase layanan informasi pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dimana Bidang Pengembangan Konstruksi telah melaksanakan 7 Layanan dan melakukan pengawasan terhadap paket pekerjaan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun 2023.

4. Pendukung Capaian Kinerja

Pencapaian indikator Persentase layanan informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi didukung oleh Program Pengembangan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh bidang Pengembangan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efisiensi atas penggunaannya sebesar 3,35%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase layanan informasi serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

I. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

II. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

a. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Bidang Pengembangan Konstruksi juga diberikan tugas khusus untuk melaksanakan salah satu Sub Kegiatan yang berada di Program Penunjang yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - I. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.

Pada APBD Perubahan Tahun 2023 Sub Kegiatan ini diberikan tambahan pagu sekitar Rp. 3.282.430.000,- dari pagu awal untuk Pengadaan 2 (Dua) Unit Alat Berat yaitu Excavator Long Arm dan Excavator Mini yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan selain 4 alat yang telah dimiliki (3 unit alat berat masih berfungsi yaitu Backhoe Loader, Tandem Roller 3,5-4 Ton, Roller Wheel 6-8 Ton dan 1 unit alat berat yaitu Vibrator Tandem Roller dalam proses pengajuan usul untuk dihapuskan).

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator ***Persentase layanan informasi dan rekomendasi teknis serta pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi kota*** tahun 2023 sebesar Rp. 142.368.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 137.597.300,- atau 96,65% dengan rincian per program sebagai berikut :

**Tabel 3. 45 Realisasi Keuangan Sasaran 8
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi**

NO	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 142.368.000	Rp. 137.597.300	99,65
Jumlah		Rp. 142.368.000	Rp. 137.597.300	99,65

Sasaran 9 : “Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang Konsisten”

Pencapaian sasaran 9 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3. 46 Analisis Pencapaian Sasaran 9
Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang Konsisten

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun RPJMD 2026
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	78	62,50	80,13	100
Rata-rata Capaian Kinerja					80,13	

Sasaran kinerja Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sasaran 9 Indikator 1 : “Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)”

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

1. Realisasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah :

**Tabel 3. 47 Realisasi dan Capaian Tahun 2023 Sasaran 9
Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
yang Konsisten**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	78	62,50	80,13

Indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 78%, dan pada akhir tahun hanya terealisasi sebesar 62,50%. Capaian kinerjanya ini sebesar 80,13%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

a. Perbandingan kinerja 2 tahun terakhir.

**Tabel 3. 48 Realisasi dan Capaian 2 Tahun Terakhir Sasaran 9
Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
yang Konsisten**

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Realisasi / capaian	Realisasi / capaian	Realisasi / capaian
1.	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	67,53 / 101,81	70 / 100	62,50 / 80,13

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja 2 tahun adalah sama yaitu 100% . Realisasi kinerja indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun ini hanya sebesar 62,50%.

- b. Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD dan Nasional.

**Tabel 3. 49 Perbandingan RPJMD dan Nasional Sasaran 9
Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target RPJMD Tahun 2026	Target Nasional
1.	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	62,50%	100%	-

Realisasi Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023 hanya sebesar 62,50%,realisasi ini belum mencapai target apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 100% dan tidak ada target nasional.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Secara garis besar indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diantaranya merupakan gabungan dari 5 sub kegiatan di Bidang Tata Ruang antara lain : mempercepat proses berkas permohonan SKRK yang telah masuk dan diterbitkan serta merencanakan monitoring yang baik sehingga dapat berjalan sesuai jadwal, mempercepat berkas permohonan FPRD yang telah masuk dan segera memproses Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Banjarbaru menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN yang selanjutnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru walaupun Proses Penyusunan RTRW belum selesai dikarenakan Tahap penyusunan RDTR dan Proses Penetapan RTRW Kota Banjarbaru Tahun 2024-2043 sampai dengan akhir bulan Desember masih dalam tahap penetapan Permen ATR /BPN di Kementerian ATR/BPN sehingga ada beberapa kegiatan seperti Sosialisasi RTRW Kota Banjarbaru belum di Perda sehingga tidak dapat dilaksanakan namun beberapa tahapan telah dilaksanakan. Menyusun RDTR Kota Banjarbaru untuk Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Aerocity serta Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang sebagai dasar dalam perijinan investasi melalui OSS.

4. Pendukung Capaian Kinerja

Pencapaian indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didukung oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan pencapaian target kinerja, telah dilakukan efisiensi atas penggunaannya sebesar 13,52%. Sedangkan untuk mendukung capaian indikator Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - I. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota.
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
 - II. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - III. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

6. Realisasi Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran awal program yang dianggarkan untuk mendukung terealisasinya indikator **Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Banjarbaru** tahun 2023 sebesar Rp 2.938.657.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.541.380.000,- atau 86,48 % dengan rincian per program sebagai berikut :

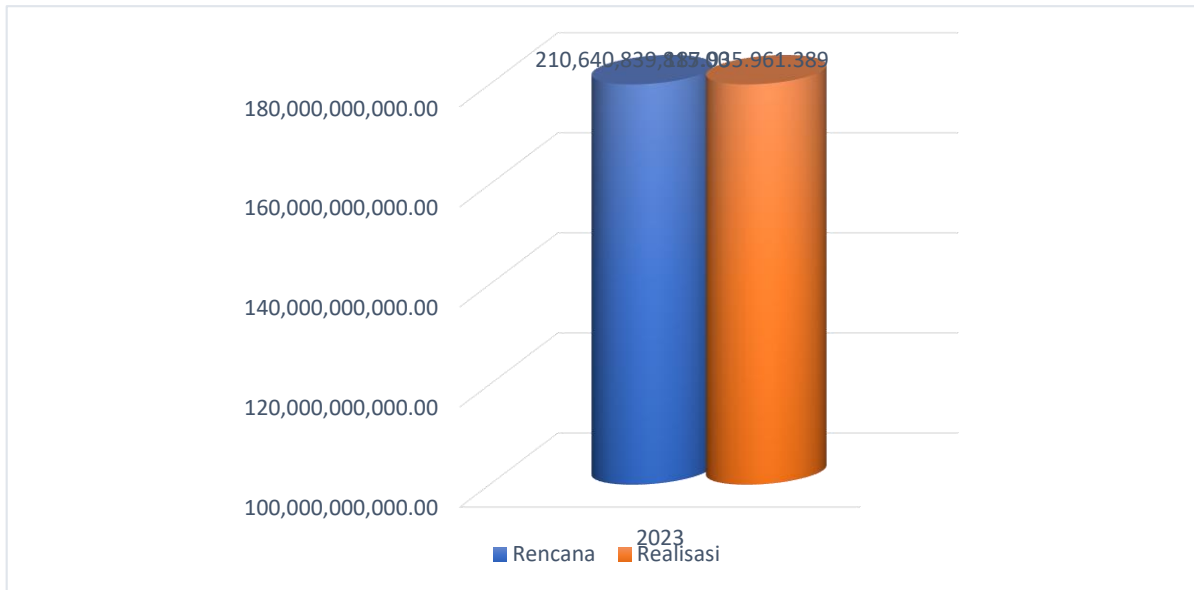
**Tabel 3. 50 Realisasi Keuangan Sasaran 9
Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang**

No.	PROGRAM	PAGU	KEUANGAN	
			REALISASI (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 2.938.657.000	Rp 2.541.380.000	86,48
Jumlah		Rp 2.938.657.000	Rp 2.541.380.000	84,48

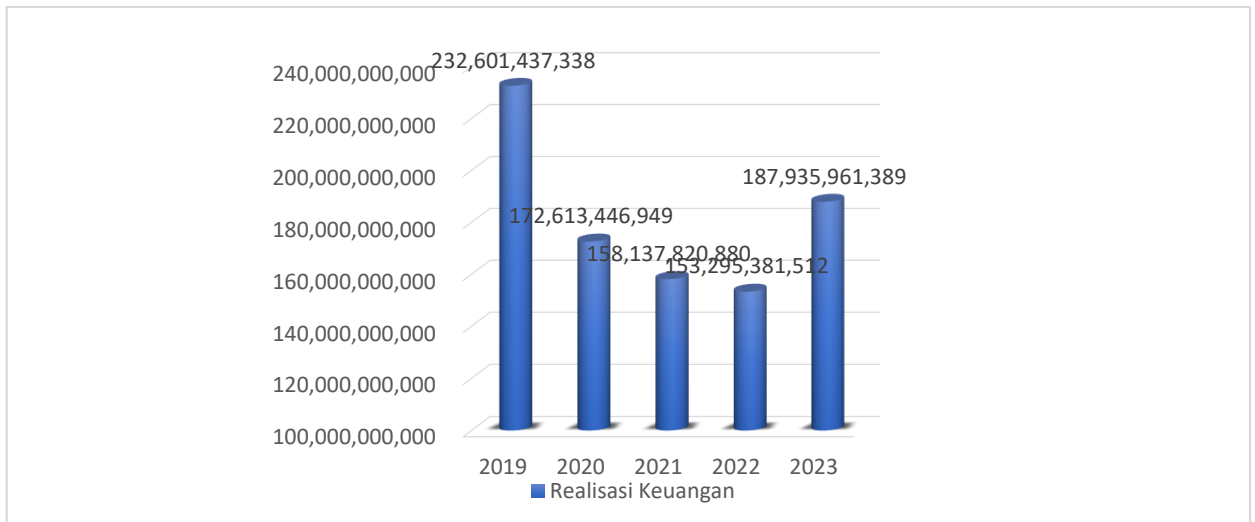
A. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun 2023 dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp 178.626.029.460,- dan mengalami kenaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Banjarbaru adalah sebesar **Rp. 210.640.839.815,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 187.935.961.389,00** atau dengan serapan dana APBD-P hanya sebesar **89,22%** dari keseluruhan pagu.

Gambar 3.1
Grafik Persentase Realisasi Keuangan Tahun 2023



Gambar 3.2
Grafik Persentase Realisasi Keuangan per Tahun



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menetapkan sebanyak 9 (Sembilan) sasaran dengan 10 (Sepuluh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru adalah 4 (empat) sasaran berkategori *Melebihi Target* dan 5 (lima) sasaran berkategori *Sesuai Target* dan 1 (satu) *Tidak Memenuhi Target*.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 210.640.839.815,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 187.935.961.389,-** atau dengan serapan dana APBD-Perubahan mencapai 89,22%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Banjarbaru.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk pelaksanaan kinerja dinas pada tahun 2023, pada umumnya seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang ideal memang perlu SDM yang sesuai dengan bidang dan tugasnya agar mudah berkomunikasi dalam pelaksanaannya, untuk itu kami telah melakukan langkah-langkah yang berkesinambungan, diantara lain :

1. Meningkatkan infrastruktur perlindungan banjir dengan tipe konstruksi yang lebih terjaga mutunya, mudah metode pelaksanaannya serta relatif cepat pelaksanaannya sehingga memaksimalkan umur konstruksi dan meminimalisasi terjadinya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
2. Melakukan perkuatan/peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk lebih memaksimalkan kinerja jaringan irigasi dan meminimalisir biaya pemeliharaan.
3. Melaksanakan lebih banyak lagi jalan kota yang dibangun yaitu dengan membuka jalan-jalan penghubung yang belum terkoneksi dengan jalan-jalan kota sesuai Rencana Umum Jaringan Jalan dan melaksanakan perbaikan kerusakan jalan-jalan kota yang makin banyak bisa tertangani.
4. Melaksanakan perbaikan saluran-saluran drainase di Kota Banjarbaru yang dibangun dan dipelihara melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
5. Melaksanakan perbaikan kerusakan jalan-jalan lingkungan yang makin banyak agar bisa tertangani secara merata.
6. Melaksanakan Pembangunan Gedung Perkantoran yang representative dengan memaksimalkan lokasi lahan pembangunan milik Pemerintah Kota dan luas bangunan berdasarkan jumlah pegawai dengan harapan dapat memberikan kenyamanan bagi para pegawai dan membangun Gedung yang bersifat Hibah serta membangun Taman serta Ikon Kota yang dapat menunjang keindahan dengan ditetapkannya Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi agar lebih tertib terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
8. Menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang masih terkendala dan melakukan Sosialisasi serta dapat diPerdakan.

Kami menyadari bahwa pembuatan Laporan Kinerja ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk dapat menyempurnakan laporan ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Banjarbaru, Februari 2024
Kepala Dinas,

EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT

Pembina Tk. I

NIP. 19730727 199803 2 008